

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SA 300 SPAP

(Studi Kasus Pada KAP Usman dan Rekan)



**MERLIANTI MONTO PALIMBONG
1410321010**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
2018**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SA 300 SPAP

(Studi Kasus Pada KAP Usman dan Rekan)



**MERLIANTI MONTO PALIMBONG
1410321010**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
2018**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SA 300 SPAP

(Studi Kasus Pada KAP Usman dan Rekan)

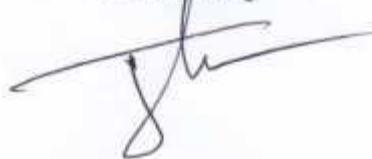
Disusun dan diajukan oleh

MERLIANTI MONTO PALIMBONG
1410321010

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 10 September 2018

Pembimbing



Teri, S.E., M.Si., Ak.,CA.,CTA.,CPA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN AUDIT LAPORAN
KEUANGAN BERDASARKAN SA 300 SPAP**

(Studi Kasus Pada KAP Usman dan Rekan)

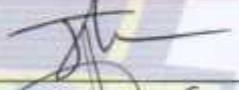
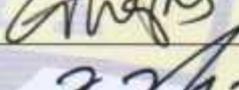
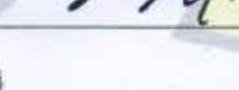
Disusun dan diajukan oleh

**MERLIANTI MONTO PALIMBONG
1410321010**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 10 September 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

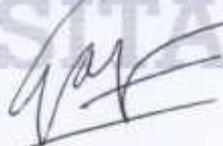
Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA	Ketua	
2	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak	Sekretaris	
3	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	
4	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M	Eksternal	

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR


Muhammad Gaffur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Merlianti Monto Palimbong

NIM : 1410321010

Program Studi : Akuntansi S1

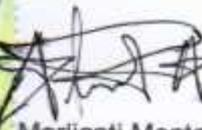
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan SA 300 SPAP**", Studi Kasus pada KAP Usman & Rekan adalah karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 September 2018

Yang membuat pernyataan,





Merlianti Monto Palimbong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan SA 300 SPAP”, Studi Kasus pada KAP Usman & Rekan”** dapat terselesaikan.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Markus Monto (Ayah) dan Martina Sanda (Ibu), kakak saya Merdiana Monto, serta adik-adik saya Esni Monto, Sherly Monto, Mira Monto, dan Vhegard Monto yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, dan cinta kasih yang tak terhingga, serta doa yang tiada pernah berhenti tercurah kepada penulis agar menjadi pribadi yang sukses, dan menjadi kebanggaan keluarga.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan saran dan nasihat serta kesabaran dan ketelitian membimbing penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Muhammad Gaffur, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.

4. Ibu Dinar, S.E., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
6. Bapak Julkifli selaku salah satu Auditor di KAP Usman & Rekan yang telah bersedia menjadi narasumber saya serta seluruh staff yang selalu menyambut saya dengan sangat baik selama melakukan penelitian.
7. Teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang selalu mendukung dan mendoakan, terima kasih atas doa dan dukungannya.
8. Terima kasih kepada seluruh sahabat terbaik (Intan Marsela, Anita, Maimanah, Mirastuti Mahajura, Novi Saperi) yang selalu memberikan motivasi, doa dan simpatinya serta yang selalu menemani setiap hari baik malam maupun siang.
9. kepada sahabat - sahabat PMK UNIFA (Rannu Bombang, kak Tri Putra Pabanga, Christine Wehantouw, Sriwanti Patandean, Elsa Kurniasari, Obednego, Irene Sagita, dan Herno) serta adik-adik PMK dan juga Kak Yulita Lembang, Semita Tandipayung, adek Christine Rorrong, Abyta dan pacar saya Harisanto Salinding yang selalu memberikan semangat, doa dan dorongan kepada saya untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua Rohani saya (mami Eka Lorensia) dan seluruh teman-teman di Gereja yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan doanya kepada saya.
11. kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, karenanya kritik dan saran sangat diperlukan dari pembaca.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 10 september 2018

Merlianti Monto Palimbong

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 pengertianAudit	9
2.1.1 Jenis-Jenis Audit	11
2.1.2 Jenis-Jenis Auditor	12
2.2 Kantor Akuntan Publik	13
2.2.1 Aktivitas & Jasa Yang Disediakan KAP	15
2.2.2 Standar Profesional Akuntan Publik	18
2.3 Audit Laporan Keuangan	21
2.3.1 Tujuan Audit Laporan Keuangan	24
2.3.2 Tahap-tahap Audit atas Laporan Keuangan	25
2.4 Perencanaan Audit Laporan Keuangan.....	26
2.4.1 Peran Perencanaan Audit Laporan Keuangan	27
2.4.2 Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan	28
2.5 Tinjauan Empirik	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Rancangan Penelitian	32

3.2 Tempat dan Waktu	32
3.3 Prosedur Penelitian	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.4.1 Jenis Data	33
3.4.2 Sumber Data	34
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Sejarah Singkat & Potensi	36
4.1.1 Visi dan Misi KAP Usman & Rekan	36
4.1.2 Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik	37
4.1.3 Pengalaman Kerja	41
4.1.4 Struktur Organisasi	42
4.2 Pembahasan	43
4.2.1 Proses Memperoleh Data	43
4.2.2 Memahami Perencanaan Audit Laporan Keuangan yang dilaku- kan oleh KAP Usman & Rekan	43
4.2.3 Membandingkan Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman & Rekan dengan Perencanaan Audit Laporan Keu- angan menurut SPAP	45
BAB V Penutup.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.5 Tinjauan Empirik	30
4.1 Perbandingan Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman dan Rekan dengan Perencanaan Audit Laporan Keuangan menurut SPAP	45
4.2 Perbandingan Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman dan Rekan dengan Operasional yang dilakukan oleh KAP Usman dan Rekan Berdasarkan SPM (dalam Standar Profesional Akuntan Publik)	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Forum Pertanyaan	57
2 Data KAP Usman & Rekan	58
3 Dokumentasi dengan Narasumber.....	59

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SA 300 SPAP

(Studi Kasus Pada KAP Usman dan Rekan)

Merlianti Monto Palimbong
Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan sudah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam SPAP. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu memperoleh data dari pihak Kantor Akuntan Publik melalui wawancara dan juga memperoleh sebagian data dari data yang sudah disediakan oleh perusahaan atau organisasi seperti desain perencanaan audit laporan keuangan KAP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan telah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang ditetapkan oleh IAPI. Dan juga terdapat kesesuaian antara desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan dengan operasional yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan dengan membandingkan dengan perencanaan audit yang diatur dalam SPM (Sistem Pengendalian Mutu) dalam SPAP (SA 300)

Kata Kunci : Perencanaan Audit, SA 300 SPAP

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SA 300 SPAP

(Studi Kasus Pada KAP Usman dan Rekan)

Merlianti Monto Palimbong
Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA

ABSTRACT

This study aims to find out whether the financial statement audit planning is carried out by Usman and Rekan KAP is in accordance with the Public Accountants Professional Standards implemented by the Indonesia Institute of Certified Public Accountants in SPAP. This study uses primary data, namely obtaining data the Public Accountant Office through interview and also obtaining a portion of data that has been provided by companies or organizations such as KAP financial statement audit planning design.

The results of this study indicate that Usman and Rekan KAP financial audit planning design in accordance with financial report audit planning according to SPAP (Public Accountant Professional Standards) established by IAPI. And there is also a match between the design of the financial statement audit plan for Usman and Rekan with operations carried out by Usman and Rekan KAP by comparing with audit planning which is regulated in SPM (Quality Control System) in SPAP (SA 300)

Keywords : Audit planning. SA 300 SPAP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Shinta (2012:53) mengemukakan bahwa dalam rangka menghindari adanya informasi yang menyesatkan bagi pengguna baik pihak internal maupun eksternal, laporan keuangan perlu di audit karena adanya perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dengan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang handal, sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Namun, akhir-akhir ini laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Upaya untuk merekayasa informasi ini telah menjadi faktor yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan sehingga apabila dalam pengambilan keputusan tanpa didasarkan pada laporan keuangan yang tidak dipercaya maka dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda antar pemakai laporan keuangan yang dapat menyesatkan dan berdampak pada keputusan yang diambil kurang tepat.

Auditing yang dilakukan oleh auditor independen merupakan suatu fungsi untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disusun manajemen telah memenuhi pedoman atau kriteria yang telah disepakati bersama atau memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustinus (2010:1) menyatakan bahwa agar audit dapat bermanfaat bagi para pemakainya, auditor independen memiliki tanggungjawab untuk menghasilkan pendapat yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki obyektivitas yang tinggi.

Adapun Ginting (2017:2) menyatakan bahwa sebelum menjalankan proses audit, tentu saja proses audit harus direncanakan terlebih dahulu. Di era globalisasi, kebutuhan jasa professional akuntan public sebagai pihak yang dianggap independen menjadi semakin luas yang menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Akuntan publik berperan dalam memberikan keyakinan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (Christiawan 2005:62).

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan (Angga 2013:2). Auditor dituntut untuk professional dalam setiap tugas auditnya, auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan (Iftitah 2010:1).

Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, auditor harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar audit yang ditetapkan, yaitu sesuai dengan standar auditing dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang meliputi: (1) Standar Umum (2) Standar Pekerjaan Lapangan (3) Standar Pelaporan. Salah satu poin yang diperhatikan dalam standar pekerjaan lapangan yaitu sebelum menjalankan proses audit, auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai.

Perencanaan audit merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan karena hal ini menyangkut standar auditing kedua yaitu standar pekerjaan lapangan (Bahri 2008:3).

Standar auditing yang menyangkut pelaksanaan kerja lapangan (*field work*) membutuhkan perencanaan yang memadai (Tunggal 2010:87). "setiap pekerjaan

harus direncanakan dengan baik dan para pembantu, jika ada, harus diawasi sebagaimana mestinya. “

Perencanaan audit adalah suatu tahapan yang terperinci, yang menyangkut prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu audit. Tujuan audit, jadwal kerja audit, dan staf yang akan diikutsertakan dalam proses audit, harus diterangkan secara jelas dalam perencanaan audit.

Perencanaan audit merupakan tahapan proses auditing yang sangat menentukan dalam keberhasilan penugasan audit. Rencana audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif (Uswatun 2013:565). Oleh sebab itu tahap-tahap perencanaan audit merupakan tahapan yang harus menjadi salah satu perhatian yang serius dari auditor.

Tunggal (2010:87-88) menyatakan bahwa ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasannya dengan baik, yaitu:

1. Agar auditor dapat memperoleh bukti kompeten yang mencukupi dalam situasinya pada saat itu. Mendapatkan bukti yang kompeten merupakan hal yang hakiki jika kantor akuntan publik ingin menekan tanggungjawab hukum seminimal mungkin dan mempertahankan reputasi yang baik dalam profesinya.
2. Untuk membantu menekan biaya audit. Dengan menekan biaya dalam batas yang wajar, kantor akuntan akan dapat bersaing sehingga para kliennya tidak akan lari darinya, dengan catatan bahwa kantor akuntan itu memang kompeten dibidangnya.
3. Untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Menghindari salah pengertian dengan klien adalah penting untuk memupuk hubungan baik dengan klien dan untuk memudahkan pelaksanaan kerja yang bermutu dengan biaya yang wajar.

Dengan banyaknya Kantor Akuntan Publik yang beroperasi saat ini, tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan persaingan yang ketat antar Kantor Akuntan Publik. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan public dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, menurut Arleen & Kurnia (2009:13). Kepercayaan yang besar pemakai laporan keuangan auditan dan jasa yang diberikan akuntan publik akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan mutu auditnya, menurut Jogi (2005:62). Audit yang berkualitas, tidak terlepas juga dari perencanaan audit yang baik.

Perencanaan bukan merupakan suatu fase audit yang terpisah dari fase audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang yang sering dimulai seketika setelah (atau dalam hubungannya dengan) penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut hingga penyelesaian perikatan audit periode kini (SA 300. Para A2). Dalam Standar Audit ("SA") 300 PARA 9(c) menyatakan bahwa prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang diisyaratkan oleh SA (Standar Audit).

Atas latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengambil judul **"Analisis Penerapan Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan SA 300 SPAP", Studi Kasus pada KAP Usman & Rekan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan sudah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan sudah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam SPAP.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Usman & Rekan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme khususnya dalam memperhatikan kepatuhan akan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia saat merencanakan suatu audit laporan keuangan.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan sebagai bahan acuan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya.

3. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mendapat latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan tentang menganalisis perencanaan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Audit

Berikut ini adalah beberapa pengertian audit yang dikemukakan oleh para Ahli:

1. Menurut ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) dalam buku Halim (2015:1) audit adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.
2. Menurut Tunggal (2010:3), auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Auditing menurut Arens (2010:4) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. *“Audit is playing an important role in developing and enhancing the global economy and business firms. Auditor express an opinion on the fairness of financial statements. This is important for the users of financial statement to gain assurance that the data are being reported, properly measured, and fairly presented”*. Audit memiliki peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dan bisnis perusahaan global. Auditor menyatakan pendapat atas kewajiban laporan keuangan. Menurut Al-Khaddash (2013:206) hal ini penting bagi para

pengguna laporan keuangan untuk memperoleh jaminan bahwa data yang dilaporkan, telah diukur, dan layak disajikan

4. Menurut Mayangsari & Wandanarum (2013:7-8) auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara obyektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang bekepentingan.

Definisi diatas mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis auditing atau pengauditan yang memiliki tujuan berbeda-beda. Ada beberapa kalimat kunci yang terkandung dalam definisi diatas, yaitu:

- a. Proses yang Sistematis

Yaitu, mengandung makna sebagai rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terencana, dan terorganisasi.

- b. Memperoleh dan menilai bukti secara obyektif

Yaitu mengandung arti bahwa auditor memeriksa dasar-dasar yang dipakai untuk membuat asersi atau pernyataan oleh manajemen dan melakukan penilaian tanpa sikap memihak.

- c. Asersi-asersi tentang Tindakan-tindakan dan Kejadian-kejadian Ekonomi

Yaitu asersi atau pernyataan tentang kejadian ekonomi yang merupakan informasi hasil proses akuntansi yang dibuat oleh individu atau suatu organisasi. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa asersi-asersi tersebut dibuat oleh penyusun laporan keuangan, yaitu manajemen perusahaan atau pemerintah, untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan, jadi bukan merupakan asersi dari auditor.

- d. Tingkat Kesesuaian antara Asersi-asersi dengan Kriteria yang telah Ditetapkan

Yaitu secara spesifik memberikan alasan mengapa auditor tertarik pada pernyataan atau asersi dan bukti-bukti pendukungnya. Namun agar komunikasi tersebut efisien dan dapat dimengerti dengan bahasa yang sama oleh para pengguna, maka diperlukan suatu kriteria yang disetujui bersama. Dalam audit laporan keuangan, kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian adalah Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

e. Mengkomunikasikan Hasilnya kepada Pihak-pihak yang Berkepentingan
Yaitu kegiatan terakhir dari suatu auditing atau pengauditan adalah menyampaikan temuan-temuan dan hasilnya kepada pengambil keputusan. Hasil dari auditing tersebut atestasi atau pernyataan pendapat (opini) mengenai kesesuaiannya antara asersi atau pernyataan tersebut dengan kriteria yang diterapkan, yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

5. APC (*Auditing Practices Committee*) *“An audit is the independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements of an enterprise by an appointed auditor in a pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligation.”* Menurut Miller dan Bailey *“An auditing is a methodical review and objective examination of an item, including the verification of specific information as determined by the auditor or as established by general practice. Generally, the purpose of an audit is to express an opinion on or reach a conclusion about what was audited.*

Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwa ada 7 elemen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu: (1) proses yang sistematis, (2) menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif, (3) asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi, (4) menentukan tingkat kesesuaian (*degree of correspondence*), (5) kriteria yang ditentukan, (6) menyampaikan hasil-hasilnya, (7) para pemakai yang berkepentingan.

Menurut Agoes & Trisnawati (2014: 146) tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa :

1. Semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas (*completeness and cut off*)
2. Beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat (*ownership and accuracy*)
3. Ketetapan dalam klasifikasi menurut kelompok/jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan (*classification*)
4. Semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai (*presentation and disclosure*)
5. Hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan.

Menurut Mugia (2015:2), Audit sangat dibutuhkan untuk membantu pemilik perusahaan dalam pengawasan atau *monitoring* perilaku manajemen, maknanya adalah auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pemilik perusahaan yakni sebagai pihak *principal* dengan manajemen sebagai *agent* dalam mengelola keuangan perusahaan termasuk melakukan proses audit terhadap kewajaran atas laporan keuangan agar terbebas dari kecurangan, salah saji material yang dapat merugikan perusahaan dan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum serta laporan yang dihasilkan dari auditor tersebut menjadi patokan untuk pemilik perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan.

2.1.1 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens (2010: 16-18) , ada tiga jenis audit, yaitu:

1. Audit Operasional

Audit operasional adalah kegiatan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Dalam audit

operasional, review atau penelaan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

2.1.2 Jenis-jenis Auditor

Menurut Mayangsari & Wandanarum (2013: 12-13), auditor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Aditor Intern (*Internal Auditor*)

Auditor intern adalah auditor yang berstatus karyawan atau pegawai dari perusahaan yang mereka periksa. Mereka terlibat dalam kegiatan penilaian

yang independen yang disebut pemeriksaan intern yang dirancang untuk membantu manajemen organisasi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.

2. Auditor Pemerintah (*Government Auditor*)

Auditor pemerintah adalah auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

3. Auditor Independen atau Akuntan Publik (*Independent Auditor*)

Auditor independen adalah auditor yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dua karakteristik auditor independen adalah (1) posisi mereka independen terhadap klien dalam melaksanakan pekerjaan audit dan melaporkan hasil auditing, dan (2) untuk berpraktik mereka harus memperoleh izin sebagai akuntan publik.

“External auditors have a responsibility to plan and perform the audit to detect material misstatements in financial statements caused by fraud (AICPA, 2002). This is a complex task requiring considerable professional judgment. Although many firms have computer software tools that assist in audit planning, and while AICPA publications and firms’ audit manuals provide general guidelines for the planning of audits, the actual planning is left largely to the auditor’s judgment.” Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud (AICPA, 2002). “Ini adalah tugas kompleks yang membutuhkan pertimbangan profesional yang cukup. Meskipun banyak perusahaan memiliki perangkat

lunak komputer yang membantu dalam perencanaan audit, dan sementara publikasi AICPA dan pemeriksaan manual perusahaan memberikan panduan umum untuk perencanaan audit, perencanaan aktual yang tersisa sebagian besar untuk pertimbangan auditor (Kerr 2013:48)".

4. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan. Tugas akuntan pendidik, yaitu: (a) Menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, (b) mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan, (c) melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi.

2.2 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Di Indonesia, menurut Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini (Halim 2015: 14).

Menurut Pasal 18 Undang-Undang No.5 tahun 2011, izin untuk membuka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan berikut :

1. Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.
2. Syarat mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan
- c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja professional pemeriksa di bidang akuntansi
- d. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu
- e. Membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit :
 - 1. Alamat Akuntan Publik
 - 2. Nama dan domisili kantor, dan
 - 3. Maksud dan tujuan pendirian kantor
- d. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
 - 1. Nama rekan,
 - 2. Alamat rekan,
 - 3. Bentuk usaha,
 - 4. Nama dan domisili usaha,
 - 5. Maksud dan tujuan pendirian kantor,
 - 6. Hak dan kewajiban sebagai Rekan, dan
 - 7. Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Di Indonesia, jumlah Kantor Akuntan Publik dari waktu ke waktu semakin bertambah, seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Sampai pada tahun ini, menurut data IAPI ada 540 KAP yang beroperasi di Indonesia.

2.2.1 Aktivitas dan Jasa yang disediakan Kantor Akuntan Publik

Jasa audit akuntan publik dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan, hal ini disebabkan karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa audit akuntan publik untuk menentukan keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan (Taufik,dkk.2012:1).

Jasa yang diberikan oleh para staf professional suatu kantor akuntan publik ada dua (Halim 2015: 20-21), yaitu:

1. Jasa Atestasi

Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian, dalam segala hal yang signifikan, dan asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor memberikan jasa atestasi dengan memberikan pendapat tertulis yang berisi kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Ada empat jenis jasa yang dapat diberikan oleh Kantor Akuntan Publik, yaitu:

a. Audit

Contoh utama dari jasa ini ialah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit laporan keuangan, klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Keyakinan yang diberikan pada audit adalah keyakinan positif (*positive assurance*).

b. Pemeriksaan (*Examination*)

Auditor dalam melaksanakan penugasan jasa ini akan memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai kriteria yang ditentukan. Keyakinan yang diberikan pada examination adalah keyakinan positif. Meskipun demikian, tingkat keyakinan yang diberikan berada di bawah tingkat keyakinan dalam audit laporan keuangan. Contoh jasa ini yaitu

pemeriksaan proyeksi bisnis atau laporan keuangan prospektif, dan pemeriksaan kesesuaian pengendalian intern perusahaan dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

c. Penelaahan (*Review*)

Jasa review atau pengkajian ulang terutama dilakukan dengan wawancara dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan. Keyakinan yang diberikan pada review adalah keyakinan negatif (*negative assurance*). Auditor diharuskan menyatakan penolakan pemberian pendapat (*disclaimer of opinion*) dalam memberikan keyakinan negatif. Laporan yang dibuat berdasarkan hasil review menyatakan “tidak perlu modifikasi yang material yang harus dilakukan agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum” sebagai pengganti dari “telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum”. Jasa review biasanya dilakukan pada laporan interim perusahaan publik atau laporan tahunan perusahaan nonpublik.

d. Prosedur yang Disepakati Bersama (*Agreed-upon Procedures*)

Lingkup kerja jasa ini lebih sempit daripada audit maupun examination. Contohnya, auditor dan klien sepakat bahwa prosedur tertentu akan dilakukan atas elemen tertentu laporan keuangan misalnya akun atau rekening kas dan surat berharga. Kesimpulan yang dibuat atas hal tersebut harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau keduanya.

2. Jasa Nonatstasi

Ada tiga jenis jasa nonatstasi yang diberikan suatu Kantor Akuntan Publik, yaitu:

a. Jasa Akuntansi

Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa kompilasi) serta perancangan sistem akuntansi klien. Dalam memberikan jasa akuntansi, praktisi yang melakukan jasa tersebut bertindak sebagai akuntan perusahaan. Dalam memberikan jasa akuntansi, akuntan tidak menyatakan pendapat.

b. Jasa Perpajakan

Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan Kantor Pajak.

c. Jasa Konsultasi Manajemen

Jasa konsultasi manajemen atau *management advisory services* (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Akuntan dapat dikontrak untuk memberikan pendapat sebagai seorang ahli mengenai suatu hal tertentu seperti penggunaan prinsip akuntansi, undang-undang pajak, dan penggunaan teknologi pemroses data-data keuangan. Akuntan publik tidak dibenarkan membuat ataupun menentukan keputusan manajemen.

2.2.2 Standar Profesional Akuntan Publik

Kepercayaan para pemakai laporan keuangan audit terhadap profesi akuntan publik sangat bergantung pada kualitas audit yang dihasilkan KAP. Menurut Asna (2010:82) kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*Independen*), patuh kepada hukum serta mentaati kode

etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental. Deddy (2012:36) juga mengatakan bahwa seorang auditor independen dikatakan profesional bila telah memenuhi dan mentaati standar-standar yang berlaku dalam melakukan suatu audit.

Standar Profesional Akuntan Publik dalam IAPI yang dikutip dalam Pradipto (2010: 23) menyatakan ada 5 tipe standar profesional yang disusun untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat, yaitu:

1. Standar Auditing

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan public dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib (*mandatory*) bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Yang termasuk dalam Pernyataan Standar Auditing adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan dalam PSA. IPSA memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA. Tafsiran ini bersifat mengikat anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (*mandatory*).

2. Standar Atestasi

Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan

prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT), yang termasuk didalamnya yaitu Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. IPSAT juga bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review

Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan public yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR), yang termasuk didalamnya adalah Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi dan Review (IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan PSAR, serta bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik dan pelaksanaannya bersifat wajib.

4. Standar Jasa Konsultasi

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dengan jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya pekerjaan jasa ini dilaksanakan untuk kepentingan klien.

5. Standar Pengendalian Mutu

Standar Pengendalian Mutu memberikan panduan bagi kantor Akuntan Publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa professional, KAP bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar yang relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam hal ini, KAP wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya, bahwa KAP dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Akuntan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan bahwa staf KAP kompeten, professional, dan obyektif serta menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas jasa audit adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP. Hal ini menyatakan bahwa setiap KAP wajib menerapkan Sistem Pengendalian Mutu yang menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu serta hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif pada sistem tersebut. Standar Pengendalian Mutu berisi panduan bagi Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya. Menurut Lukito (2015:39), sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik, mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penerapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan. Oleh karena itu, KAP harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan professional dengan berbagai standard dan aturan relevan yang berlaku.

Menurut Halim (2015: 22) dalam menjaga mutu jasa KAP, terdapat beberapa regulasi yang mengatur, seperti:

- a. Penetapan Standar. Adanya PSAK, SPAP, Kode Etik Akuntan, dan Kode Etika Akuntan Publik.
- b. Aturan Pemerintah. Diterbitkannya Undang-undang, misalnya Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.
- c. Peraturan KAP. Kantor Akuntan Publik biasanya memiliki aturan tersendiri untuk para anggotanya.
- d. Aturan Kolega. Contohnya peer-review.

2.3 Audit Laporan Keuangan

Menurut Halim (Auditing. 2015: 61-62), Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan auditor independen, pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Perlunya dilakukan audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak diluar manajemen, sehingga diperlukan pihak yang independen untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan. Pemilik perusahaan membutuhkan jasa audit untuk memverifikasi informasi yang diberikan dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, Mulgia (2015:1-2). Hal ini disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Laporan keuangan berkualitas bila memenuhi kriteria relevansi atau keberpautan (*relevance*) dan reliabilitas atau keterandalan (*reliability*). Kriteria relevansi dipenuhi bila laporan keuangan mempunyai nilai preditif (*predictive value*) dan atau nilai balikan (*feedback value*) dan disajikan tepat pada waktunya. Kriteria reliability bertumpu pada keterujian (*verifiability*), kenetralan (*neutrality*), dan ketepatan penyimbolan (*presentation faithfulness*). Para pemakai laporan

keuangan melihat laporan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah memenuhi kedua kriteria tersebut. Oleh karena itu, auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan teknik audit, Ruslan (2011:21) dan untuk menjalankan perannya auditor haruslah bersikap secara professional, Laurent (2013:2).

Ada empat alasan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan yang dikemukakan oleh Halim (2015: 62-63), yaitu:

1. Perbedaan kepentingan

Ada beberapa kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan pemakai laporan keuangan. Para pemakai mengharapkan kepastian dari auditor independen bahwa laporan keuangan bebas dari pengaruh konflik kepentingan terutama kepentingan manajemen. Auditor independen juga diharapkan mempertimbangkan setiap kebutuhan dari berbagai kelompok pemakai laporan keuangan. Audit laporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan keyakinan pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan bersifat netral sehingga tingkat reliabilitasnya dapat ditingkatkan.

2. Konsekuensi

Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai yang berpengetahuan dan mengerti tentang laporan keuangan.

3. Kompleksitas

Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan yang semakin kompleks dan mengakibatkan semakin tingginya resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan, sehingga menyulitkan para pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Mereka mengandalkan laporan auditor independen atas laporan keuangan auditan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan.

4. Keterbatasan Akses (*Remoteness*)

Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Jika para pemakai ingin mengakses data secara langsung, maka mereka akan menghadapi kendala waktu, biaya, ketelitian, dan tenaga. Oleh karena itu, mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga yaitu auditor independen.

2.3.1 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Tujuan umum audit (Halim 2015: 157) adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan.

Riadi (2013) mengklasifikasi tujuan audit secara umum sebagai berikut :

1. Kelengkapan (*Completeness*). Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.
2. Ketepatan (*Accuracy*). Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.

3. Eksistensi (*Existence*). Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
4. Penilaian (*Valuation*). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
5. Klasifikasi (*Classification*). Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
6. Pisah Batas (*Cut-Off*). Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
7. Pengungkapan (*Disclosure*). Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

2.3.2 Tahap-tahap Audit atas Laporan Keuangan

Kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh auditor, oleh karena itu pelaksanaan audit yang baik harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Febriana 2016:4). Ada empat tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan (Halim 2015: 89), yaitu:

1. Penerimaan penugasan audit

Pertimbangan penerimaan penugasan audit perlu dilakukan apabila auditor belum mengenal maupun berhubungan dengan klien sebelumnya. Pertimbangan berkaitan erat dengan standar umum.

2. Perencanaan audit

Perencanaan audit berguna untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan audit. Perencanaan yang buruk akan berakibat kegagalan audit. Tahapan ini berkaitan erat dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan.

3. Pelaksanaan audit

Pengujian atau tes audit dimaksudkan untuk menghimpun bukti mengenai efektivitas struktur pengendalian intern dan untuk memberikan dasar bagi pemberian pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Tahapan ini berkaitan erat dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan.

4. Pelaporan hasil temuan

Pelaporan hasil audit, yang didasarkan atas berbagai temuan, dilakukan dalam bentuk laporan auditor independen. Tahap pelaporan temuan berkaitan erat dengan standar umum dan standar pelaporan.

2.4 Perencanaan Audit Laporan Keuangan

“Auditors are responsible for planning and performing an audit to obtain reasonable assurance about whether financial statements are free from material misstatement” (Abdullatif 2013:60). Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Oleh karena itu, dalam merencanakan audit laporan keuangan auditor harus menyusun rencana dengan baik.

Dalam Standar auditing yang menyangkut pelaksanaan kerja lapangan (*field work*) membutuhkan perencanaan yang memadai, Tunggal (2010: 87) menyatakan "Setiap pekerjaan harus direncanakan dengan baik dan para pembantu, jika ada, harus diawasi sebagaimana mestinya."

"The audit process planning is a fundamental basis in the exercise of audit process, as the auditor should develop plans and strategies to avoid potential problems, where the plan includes an upgraded help in identifying problems in advance, regardless of their size and complexity, which increase the interest to solve these problems and ensure a neutral and clean opinion about the fairness and credibility of the company's financial statements when being audited" (Ahmed 2014:96). "Perencanaan proses audit adalah dasar fundamental dalam pelaksanaan proses audit, sebagai auditor harus mengembangkan rencana dan strategi untuk menghindari potensi masalah, di mana rencana dapat membeikan bantuan dalam mengidentifikasi masalah di muka, terlepas dari ukuran dan kompleksitas mereka, yang meningkatkan minat untuk memecahkan masalah ini dan memastikan pendapat netral dan bersih tentang keadilan dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan saat ini sedang diaudit".

Menurut Halim (2015: 109), kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit, dan tahap ini sangat dipengaruhi oleh informasi awal yang diperoleh saat pertimbangan penugasan audit. Auditor perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan, dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan sangat tergantung pada: (1) ukuran dan kompleksitas perusahaan klien, (2) pengalaman auditor dengan klien, (3) pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya.

Selain 3 hal di atas, terkait hubungan auditor dengan klien juga perlu diperhatikan. Helman (2014:249) juga menyatakan "*Close ties to the client may threaten auditor independence*". artinya hubungan yang dekat dengan klien bisa mengancam independensi auditor, oleh karena itu hal ini perlu menjadi diperhatikan saat penugasan staf.

2.4.1 Peran Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Dalam Standar Auditing ("SA") seksi 300 para.2 menyatakan bahwa "perencanaan yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit.
2. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu.
3. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengubah perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
4. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespons resiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka.
5. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka.
6. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.

2.4.2 Tahap-tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Menurut Halim (Auditing 2015: 110), ada enam langkah yang dilakukan dalam perencanaan audit, yaitu:

1. Menghimpun Pemahaman Bisnis Klien dan Industri klien
2. Melakukan Prosedur Analitis
3. Melakukan Penilaian Awal Terhadap Materialitas
4. Menilai Risiko Audit
5. Mengembangkan Strategi Audit Pendahuluan untuk Asersi yang Signifikan
6. Menghimpun Pemahaman Struktur Pengendalian Intern Klien

Dalam Standar Audit ("SA") seksi 300 tentang "Aktivitas Perencanaan" menyatakan bahwa auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit.

Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut Standar Auditing (IAPI, 2014):

1. Memperoleh informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. (SA seksi 315)
2. Memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. (SA seksi 315)
3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan (SA seksi 402)
4. Melaksanakan prosedur analitik (SA seksi 520)
5. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit (SA seksi 320)
6. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubah pengujian audit, seperti resiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (SA seksi 315)

7. Memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. (SA seksi 319)
8. Menetapkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan (SA seksi 315)
9. Membuat kertas kerja (SA seksi 339)
10. sPos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau adjustment (SA seksi 311)
11. Sifat laporan auditor diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang akan diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian) (SA seksi 330).

2.5 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Tinjauan Empirik

NO	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil
1.	Agustinus / 2010	Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulistyo &Rekan	Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Joachim Sulistyo & Rekan sudah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
2.	Evan Hadinata Ginting / 2017	Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Richard	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perencanaan audit yang

		Risambessy & Rekan	<p>dilakukan oleh KAP Richard Risambessy & Rekan masih menggunakan standar lama, yaitu SPAP berbasis US GAAS. Sedangkan menurut SPAP yang berlaku saat ini, seharusnya KAP Richard Risambessy & Rekan sudah menggunakan perencanaan audit versi terbaru berdasarkan SPAP berbasis International Standard on Auditing (ISA).</p>
--	--	--------------------	---

Sumber: di olah 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Arikunto (2013: 100) penelitian adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. Tujuan dari suatu penelitian yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian analisis perencanaan audit laporan keuangan.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, Arikunto (2013: 234). Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dan data yang akan dikumpul berupa sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan desain perencanaan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Usman & Rekan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan yang terletak di Jl. Maccini Tengah No. 21, Makassar. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yakni bulan Juli-Agustus 2018.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Perencanaan Penelitian

Yaitu meliputi: penentuan tema/masalah, studi pendahuluan, penyusunan proposal, pengembangan instrumen, proses perizinan.

2. Pengumpulan data

Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab setiap rumusan masalah yang telah disusun. Data-data yang dikumpulkan berupa desain perencanaan audit laporan keuangan

3. Pengolahan dan analisis data

Dalam pengolahan data, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara direduksi.

4. Penyusunan laporan hasil penelitian

Menyusun hasil laporan pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah.

5. Kesimpulan dan saran

Menyusun kesimpulan dan memberikan saran bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya mengenai penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian tidak akan selesai tanpa adanya data yang dikumpulkan oleh peneliti. Sejalan dengan itu, menurut Kuncoro (2009: 145) "Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan." Selanjutnya, penjelasan mengenai pengumpulan data, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data akan di jelaskan berikut ini:

3.4.1 Jenis Data

Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam

menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya mencari pemecahan atas masalah tersebut atau alternatif yang sesuai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

Data kualitatif merupakan data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data kualitatif yaitu penggambaran tentang objek penelitian berupa sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berupa penggambaran tentang objek penelitian yang berupa sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan dan desain perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Usman & Rekan.

3.4.2 Sumber Data

Menurut Hanke & Reitsch (1993:bab 3) dan Kuncoro (2009:148) berdasarkan sumbernya, data umumnya berasal dari Data primer yang biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original, berupa wawancara.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu memperoleh data dari pihak Kantor Akuntan Publik melalui wawancara dan juga memperoleh sebagian data dari data yang sudah disediakan oleh perusahaan atau organisasi seperti desain perencanaan audit laporan keuangan KAP.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Interview/Wawancara, yaitu melalui tanya jawab dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan memeriksa secara teliti dan mendalam atas dokumen dan catatan yang berhubungan dengan perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan, kemudian dipahami dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan pada KAP dengan Standar Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memahami perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP dengan cara wawancara dengan pihak yang bertanggungjawab dengan perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Usman & Rekan.
2. Membandingkan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP.
3. Membandingkan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh KAP berdasarkan SPM (Sistem Pengendalian Mutu) dalam SPAP.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah singkat & Potensi

Kantor Akuntan Publik (KAP) Usman & Rekan didirikan pada tahun 1987 dan telah memperoleh izin untuk memberikan jasa profesional dalam praktik Akuntan Publik dari Direktorat Jenderal Moneter dalam Negeri dengan surat izin No. 52-3386/MR/1985 tertanggal 31 Mei 1985 dan surat izin menjalankan Praktek Akuntan Publik No. SI-817/MK.II/1987. Sejak tahun 1997, KAP Usman & Rekan telah terdaftar di BAPEPAM sebagai pemeriksa perusahaan publik.

Kini KAP Usman & Rekan berbentuk perserikatan perdata dengan dukungan tenaga-tenaga profesional berpengalaman, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang Auditing, Perpajakan, dan Desain Sistem Informasi Manajemen dan telah mengikuti pendidikan di dalam dan luar negeri. Selain itu secara teratur staf KAP Usman & Rekan dikirim untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan profesi lanjutan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi yang terkait untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan jasa.

4.1.1 Visi & Misi KAP Usman & Rekan

Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan tetap berdiri teguh sampai saat ini karena terus berpegang kuat pada Visi dan Misi yang ditetapkan. Berikut visi dan misi KAP Usman & Rekan :

a. Visi

Membangun dan membudayakan transparansi dan akuntabilitas, independensi berkualitas dan terpercaya dalam pengelolaan usaha/lembaga/organisasi.

b. Misi

1. Menjadi konsultan yang memberikan pelayanan profesional yang bermutu dan terpercaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan

2. pengawasan dunia usaha/ lembaga/ organisasi dalam segala aspek dan konteksnya.
3. Senantiasa siap melakukan perubahan menuju yang lebih baik dan mengikuti perubahan teknologi dan persaingan.
4. Senantiasa berusaha menciptakan hubungan yang bersifat mutualisme.

4.1.2 Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik

1. Jasa Perpajakan

2. Jasa Rutin Bulanan (Retainer Fee)

Konsultasi secara lisan baik langsung atau melalui telepon, dan konsultasi secara tertulis, review pelaporan pajak (SPT Masa) berdasarkan Laporan Keuangan dan data klien lainnya yang meliputi :

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26
2. SPT Masa PPh Pasal 23/26
3. SPT Masa PPh Final
4. SPT Masa PPN/PPnBM

Informasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan kegiatan usaha persaaan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peratuan Menteri Keuangan sampai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan utama jasa rutin bulanan (retainer fee) adalah memberikan konsultasi berupa saran atau pendapat atas kasus dan masalah perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Review Perpajakan

Melakukan review atas laporan keuangan perusahaan (semesteran atau Tahunan) guna menghitung pajak-pajak yang seharusnya terhutang dalam

periode yang bersangkutan. Hasil review dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, dan diikuti dengan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) apabila diperlukan.

4. Konsultasi Penyusunan SPT Tahunan

Konsultasi Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, Konsultasi Penyusunan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

5. Penyusunan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Melakukan pengkajian aspek perpajakan erhadap semua transaksi yang telah terjadi sampai dengan kondisi tahn terakhir termasuk dokumen kontrak/perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketiga, kontrak/perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, guna mendapatakansatu solusi/alternatif terbaik sebagai pedoman bagi manajemen untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. penyusunan perencanaan pajak bertujuan agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil yang hendak dicapai, yaitu; pembayaran pajak yang efisien melalui strategi, prosedur dan kewajiban manajemen dengan tetap berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Jasa Bersifat Teknis atau Kasus

- a. Jasa pengurusan administrasi perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, permohonan pengukuhan sebagai PKP, dll.
- b. Mendampingi perusahaan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- c. Jasa pengurusan restitusi (pengambilan kelebihan pembayaran pajak), pengajuan keberatan, banding, peninjauan kembali (PK), permohonan surat keterangan bebas (SKB) perpajakan.

- d. Jasa perpajakan yang bersifat teknis atau kasus lainnya, jasa-jasa yang bersifat teknis dan kasus hanya akan dilakukan atas dasar permintaan dan kebutuhan dari klien.

7. General Audit

General Audit merupakan pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Audit Umum tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Akuntan Indonesia, dan Sistem Pengendalian Mutu KAP.

8. Management (Operational Audit)

Audit operasinal merupakan audit yang bertujuan untuk menilai 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif) suatu kegiatan, program dan fungsi yang diterapkan oleh manajemen suatu institusi bisnis atau pemerintah. Melalui jasa audit ini, kami dapat membantu manajemen mengidentifikasi "penyebab hakiki" dari ketidak ekonomisan, inefisiensi dan ketidakefektifitan kegiatan, program atau fungsi sehingga diperoleh solusi/tindak lanjut yang tepat.

9. Forensic/Investigative Audit

Audit *forensic/investigative* bertujuan untuk membantu pihak Direksi, Komisaris, Pimpinan dan Atasan Pimpinan institusi bisnis atau pemerintahan yang berkepentingan atas laporan keuangan atau aktivitas yang bebas dari praktik kecurangan (KKN) yang ditimbulkan oleh *management* dan *employee fraud*.

10. Management/Accounting Information System

Tujuan sistem informasi manajemen/sistem informasi akuntansi ini adalah untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan keekonomisan, efesieensi dan efektivitas

instansi bisnis/pemerintahan. Kami dapat membantu manajemen dalam merancang sistem informasi akuntansi dan atau mengembangkan komputerisasi sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terintegrasi termasuk solusi masalah-masalah yang berhubungan dengan komputerisasi sistem informasi manajemen melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat.

11. *Assessment of Public Sector Accounting*

Dalam rangka reformasi manajemen keuangan, Pemerintah RI mewajibkan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membuat laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD yang dikelola. Laporan tersebut harus disusun berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam P Nomor 24 Tahun 2005. Kami memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membantu instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan dimaksud. Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan software aplikasi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan akurat.

12. *Assessment of Good Corporate Governance (GCG)*

Perusahaan yang sukses tidak hanya diukur dari kinerja keuangannya, tetapi juga bagaimana implementasi "tata kelola perusahaan yang baik" (*Good corporate Governance*). Kami dapat membantu perusahaan (*assessment*) dalam rangka memahami konsep-konsep GCG, menyusun *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, *Internal Audit Charter*, *Audit Committee Charter*, *Board of Director Manual*, *Corporate Secretary Manual*, mengembangkan *key Performance Indicator* (KPI) dan parameter yang relevan dengan jenis dan pertumbuhan usaha perusahaan.

13. *Training Services*

Ciri utama sikap profesional adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan dari pihak-pihak yang dilayani. Agar mampu meningkatkan perannya dengan baik, para profesional baik dibidang swasta maupun pemerintahan harus memiliki kompetensi dan integritas yang handal. *Training services department* KAP Usman & Rekan dengan modul-modul dan instruktur yang berpengalaman dapat membantu meningkatkan kompetensi staf profesional tersebut.

4.1.3 **Pengalaman Kerja**

KAP Usman & Rekan telah berpengalaman dalam memberikan jasa-jasa di bidang keuangan, manajemen dan perpajakan serta komputerisasi SIM. Pimpinan & staf kami telah banyak melakukan audit dan atau memberikan nasehat pada perusahaan perseorangan sampai dengan perusahaan multinasional, besar dalam bidang usaha industri, perdagangan ,maupun jasa. Tugas-tugas konsultasu manajemen dan operasi pada perusahaan yang telah beroperasi tetapi juga meliputi perancangan secara terintegrasi pada perusahaan yang baru direncanakan. Sejak tahun 1994 KAP Usman & Rekan mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) PPN dan PPn BM.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah maka sejak tahun 2005, kami telah melakukan audit Laporan Dana Kampanye PILKADA Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pilpres serta DPR/DPD.

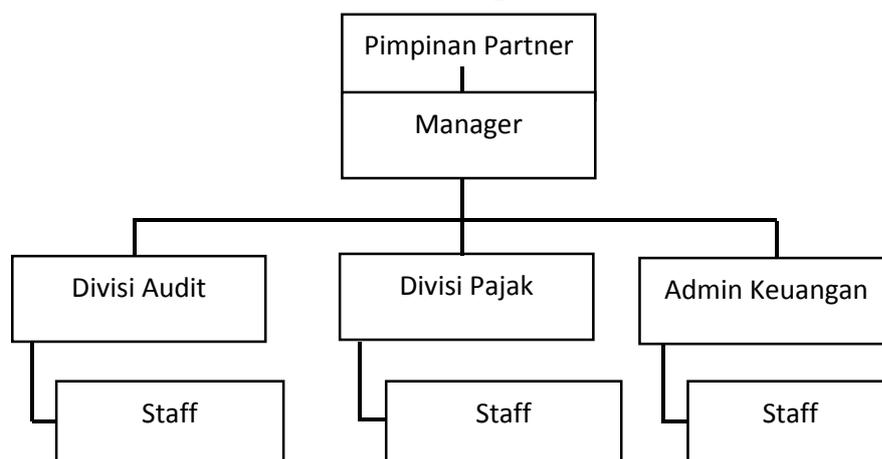
Bidang-bidang usaha yang telah menggunakan jasa profesi KAP Usman & Rekan meliputi:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Perdagangan & Publikasi | 10. Koperasi |
| 2. Ekspor Impor | 11. konsersium |

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 3. Perkebunan | 12. perikanan |
| 4. Kontraktor | 13. Rumah Sakit |
| 5. Pelayaran | 14. LSM |
| 6. Pendidikan | 15. Biro Perjalanan |
| 7. Perbankan | 16. BUMN |
| 8. Pertambangan | 17. Asuransi |
| 9. Leasing | 18. Percetakan & Industri |

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Diolah 2018

4.2 Pembahasan

4.2.1 Proses Memperoleh Data

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan. Awalnya penulis mengajukan surat penelitian pada KAP tersebut melalui Ibu Nurlena selaku salah satu staff bagian administrasi di kantor tersebut. Setelah mengajukan surat penelitian ke Ibu Nurlena, penulis di suruh untuk menunggu informasi selanjutnya dari pihak KAP melalui telpon dalam jangka waktu 2-7 hari karena surat tersebut akan di berikan terlebih dahulu kepada pihak yang akan menjadi

narasumber dari si penulis, dalam hal ini adalah auditor untuk diketahui apakah diterima untuk meneliti di kantor tersebut atau tidak.

Setelah menunggu selama 3 hari, penulis mendapat telpon dari pihak KAP bahwa penulis diterima untuk melakukan penelitian di KAP tersebut. Setelah itu, pihak KAP mengatur jadwal kapan penulis bisa mulai untuk melakukan penelitian. Setelah mengatur jadwal, kemudian penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan dokumen. Dan selama melakukan penelitian di KAP Usman dan Rekan, penulis selalu di sambut dengan sangat baik oleh para staff.

4.2.2 Memahami perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan

Pada tanggal 14 agustus 2018, peneliti pertama kali memulai penelitian ini. Di KAP Usman & Rekan peneliti berkesempatan mewawancarai salah satu staf. Beliau bernama Julkifli, kebetulan beliau sudah sekitar 14 tahun melaksanakan tugasnya sebagai seorang auditor di KAP Usman & Rekan, tepatnya pada tahun 2004 pak Julkifli memulai karirnya sebagai auditor di kantor tersebut.

Selain wawancara peneliti melakukan pengamatan dokumen. Pak Julkifli selaku salah satu auditor di KAP Usman & Rekan yang berhubungan dengan perencanaan audit laporan keuangan KAP tersebut, peneliti menanyakan perihal, bagaimana proses terjadinya perencanaan dalam suatu audit?.

“Pak Jul menjelaskan bahwa saat menerima permintaan untuk melakukan audit, pihak KAP Usman & Rekan akan melakukan survey terlebih dahulu yang disebut masa Pra-perikatan Audit. Pada tahap ini KAP Usman & Rekan akan melakukan survey untuk mendapatkan informasi mengenai klien tersebut, untuk klien baru pihak KAP Usman & Rekan akan untuk klien lama maka ada kemungkinan tidak turun lapangan untuk melakukan survey, KAP hanya memberikan balasan kepada klien, apakah akan melanjutkan perikatan tersebut, dan dibuatkan kontrak baru”.

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang bagaimana ketika perusahaan melakukan pergantian manajemen?.

“Menurut penjelasan pak Jul, untuk kasus pergantian manajemen, maka ada kemungkinan KAP akan turun lagi untuk melakukan survey, namun dalam hal ini hanya sebatas silaturahmi dan untuk memahami dan mengenal manajemen baru klien tersebut. Tidak selamanya permintaan klien akan diterima oleh KAP Usman & Rekan, KAP berhak untuk menolak, jika : (a) KAP tidak diizinkan melakukan survey pendahuluan, (b) klien tersebut tersangkut masalah hukum, (c) tingkat resiko yang dihadapi terlalu tinggi”.

Setelah memperoleh pemahaman, maka KAP akan melakukan diskusi kesepakatan perikatan dengan klien, kemudian membuat surat Perikatan Audit. Setelah itu, menyusun staff yang akan ditugaskan untuk turun melaksanakan penugasan audit, perlu diketahui bahwa KAP Usman & Rekan sangat menjaga independensi dalam melaksanakan *staffing*. Oleh karena itu untuk kepentingan independensi, maka staff tidak diperkenankan menerima penawaran penugasan dari klien, jika ada ikatan keluarga dengan direksi, klien, dan sebagainya. Setiap staff yang mendapatkan tugas, diwajibkan mengisi pernyataan independensi.

Dalam melaksanakan tugasnya, staff diawasi dan disupervisi oleh pimpinan. Staff tidak diperkenankan menerima imbalan atau penggantian/ pemberian apapun langsung dari klien, dan juga tidak melakukan hubungan dan transaksi yang tidak diizinkan oleh KAP (pimpinan). Dalam tugas-tugas khusus tertentu, seperti tugas dari Bank Indonesia, maka penugasan harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan.

Dari hasil wawancara diatas, bisa di ambil kesimpulan bahwa suatu perikatan audit itu tidak serta merta langsung di setujui oleh KAP. Dikarenakan pihak KAP akan melaksanakan pra audit, dimana pra audit bertujuan untuk mengetahui lebih dalam suatu perusahaan yang akan di audit. Selanjutnya, ketika pihak KAP telah melakukan perikatan dengan klien, pihak KAP kemudian menyusun staff yang akan di tugaskan untuk melakukan pengauditan.

4.2.3 Membandingkan Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman & Rekan dengan Perencanaan Audit Laporan Keuangan menurut SPAP

Untuk mengetahui apakah perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Usman & Rekan sudah sesuai dengan SPAP, maka penulis membandingkan antara desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan yang tercantum dalam buku SPM (Sistem Pengendalian Mutu) KAP Usman & Rekan dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP.

Berikut ini diuraikan perbandingan antara perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan (yang di dapat melalui wawancara) dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP.

Tabel 4.1
Perbandingan Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman & Rekan dengan Perencanaan Audit Laporan Keuangan menurut SPAP

NO.	Perencanaan Audit Laporan Keuangan Menurut Standar Auditing (yang terdapat dalam SPAP)	Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman & Rekan (yang terdapat dalam buku SPM)	Keterangan
1.	Memperoleh informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. (SA seksi 315)	Sebelum menerima tawaran dari klien, maka KAP terlebih dahulu akan melakukan survey pendahuluan dengan mencari informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis entitas tersebut.	() Sesuai
2.	Memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. (SA seksi 330)	Mencari tau informasi tentang kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan oleh calon klien.	() Sesuai
3.	Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan (SA seksi 402)	Melihat dan menilali metode dan strategi yang digunakan oleh entitas dan keterikatan dengan organisasi luar entitas yang berkaitan dengan informasi akuntansi entitas.	() Sesuai
4.	Melaksanakan prosedur analitik (SA seksi 520)	Melakukan prosedur analitik terhadap entitas tersebut	() Sesuai
5.	Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit (SA seksi 320)	KAP mempertimbangkan materialitas yang mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.	() Sesuai

6.	Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubah pengujian audit, seperti resiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (SA seksi 315)	Melihat kondisi yang mungkin akan menimbulkan resiko kecurangan dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan klien.	() Sesuai
7.	Memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien (SA seksi 319)	Mencari tau dan memahami struktur pengendalian internal klien	() Sesuai
8.	Menetapkan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan (SA 315)	Melihat, mengamati dan memperhitungkan resiko yang akan ditanggung oleh auditor	() Sesuai
9.	Membuat kertas kerja (SA seksi 339)	Membuat kertas kerja audit dan disatukan dalam satu file.	() Sesuai
10.	Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau adjustment (SA seksi 311)	Mengamati pos dalam laporan keuangan klien yang mungkin butuh untuk disesuaikan.	() Sesuai
11.	Sifat auditor diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang akan diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian) (SA seksi 330)	Sifat auditor yang diberikan, sebagai hasil dari proses survei diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kepatuhan entitas terhadap kontrak perjanjian yang akan dijalankan selama proses audit dilakukan.	() Sesuai

Sumber Data: Hasil Olahan, Tahun 2018

Keterangan :

Tahapan Perencanaan audit ada dalam desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan

X Tahapan perencanaan audit tidak ada dalam desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan

Setelah melihat dan membandingkan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan dengan desain perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP pada tabel 4.1, maka dapat dilihat bahwa hasil perbandingan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan dengan SPAP. Pada tahapan perbandingan ini, dapat dikatakan bahwa perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan sudah memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

Tabel 4.2
Perbandingan Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman & Rekan dengan Operasional yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan berdasarkan SPM (dalam Standar Profesional Akuntan Publik)

NO	Perencanaan Audit Laporan Keuangan yang dimuat dalam Sistem Pengendalian Mutu dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)	Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Usman & Rekan (yang dikembangkan dari buku SPM)	Operasional yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan	Prosedur yang dilakukan oleh peneliti	keterangan
1.	Prosedur Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien				
	1.KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu.(Para 26)	1.Menerima permintaan penawaran jasa audit dari calon klien yang baru maupun lama.	KAP Usman & Rekan menerima penawaran jasa audit dari klien baru maupun lama	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, permintaan penawaran audit dari klien dapat melalui surat permintaan jasa audit, telepon, dan email.
	2.Keputusan untuk melanjutkan hubungan dengan klien mencakup pertimbangan atas hal-hal signifikan yang mungkin timbul selama perikatan kini maupun terdahulu, dan implikasi dalam melanjutkan hubungan tersebut. (Para A16)	2.Membuat dan mengirimkan jawaban kepada calon klien atas penawaran tersebut.	Usman & Rekan akan membuat dan mengirimkan jawaban kepada calon klien atas penawaran klien.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, Pihak Usman & Rekan akan membalas permintaan audit dari klien, yang berisi jawaban atas penawaran klien. Jika jawaban KAP Usman & Rekan bersedia, maka KAP sekaligus akan meminta kesediaan klien untuk di survey pendahuluan.
	3.KAP harus memperoleh informasi yang dianggap perlu sebelum menerima perikatan dari suatu klien baru, ketika mempertimbangkan keberlanjutan	3. Melakukan survey pendahuluan (integritas klien)	Setelah KAP Usman & Rekan mengirimkan konfirmasi balasan penawaran	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, Survey pendahuluan dilakukan untuk menghimpun pemahaman

	perikatan yang ada, dan ketika mempertimbangkan penerimaan suatu jenis perikatan yang baru dari klien yang ada. (Para 27)(Ref. Para. A16)		n klien, maka KAP akan melakukan survey pendahuluan		bisnis klien dan industri klien. Setelah itu didokumentasikan dalam berita acara survey pendahuluan, yang berisi tentang pihak-pihak yang terkait, disertai hasil survey pendahuluan.
	4.KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur atas keberlanjutan suatu perikatan dan hubungan dengan klien untuk menangani suatu kondisi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak perikatan seandainya informasi terkait tersedia lebih awal. (Para 28)	4.Kesepakatan Perikatan	Setelah melakukan survey pendahuluan, KAP akan melakukan diskusi kespakatan perikatan.	Wawancara	() Sesuai dengan keterangan, atas dasar survey pendahuluan, KAP Usman & Rekan kemudian melakukan diskusi kesepakatan perikatan mengenai waktu dan biaya, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
	5.(Para 26)KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien perikatannya jika beberapa hal yang dipertimbangkan (Ref. Para. A13-A15)	5.Membuat dan menandatangani Surat Perikatan Audit	KAP Usman & Rekan akan membuat dan menandatangani surat perikatan audit dengan klien.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, Jika sudah disepakati, SPK kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak (klien dan KAP Usman & Rekan). Surat Perikatan berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Independensi					
	1.KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personel yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan. (Para. 29) (Ref. Para. A18-A22)	1. Staffing Audit	Setelah menandatangani surat Perikatan audit, maka KAP Usman & Rekan akan menentukan team audit yang akan turun melaksanakan audit.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, <i>Staffing</i> ditentukan berdasarkan pengalaman kerja, ukuran dan kompleksitas entitas, serta kemampuan untuk dapat bekerjasama antara staf yang satu dengan yang lain.

	2.KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menugaskan personel yang tepat dengan kompetensi yang dibutuhkan. Setiap personel KAP harus segera memberitahukan kepada KAP mengenai kondisi dan hubungan yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi, sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat dilakukan. (Para 22(b))	2. Identifikasi keterkaitan staff dengan klien	Dalam menentukan staff yang akan bertugas, KAP akan melakukan identifikasi keterkaitan staffnya dengan klien.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, Personil staff tidak diperkenankan menerima penugasan dari klien yang bersangkutan, jika ada hubungan istimewa dengan klien (seperti hubungan keluarga, teman, dan sebagainya). Serta saat melaksanakan tugas profesi harus menjaga independensi agar tidak rusak, contohnya menerima imbalan atau penggantian / pemberian apapun langsung dari klien.
--	--	--	---	----------------------------------	--

	3. Konfirmasi tertulis sehubungan dengan independensi personil KAP. (Para A9, Ref. Para. 24) Sekurangnya sekali dalam setahun, KAP harus memperoleh konfirmasi tertulis mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur independensi dari personel (Para. 24)	3. Membuat Surat Pernyataan Independensi	Staff Usman & Rekan akan membuat Surat Pernyataan Independensi.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, Staf yang mendapatkan tugas, diwajibkan mengisi pernyataan independensi, yang dibuat untuk menekankan dan menguatkan keyakinan kepada klien sebagai bukti bahwa Auditor telah memenuhi persyaratan independensi.
--	--	--	---	----------------------------------	--

	4. Setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta berjalan dengan efektif. (Para. 48) (Ref. Para. A55-A59)	4. Monitoring Lapangan	Pimpinan KAP melakukan monitoring lapangan terhadap staffnya.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, setiap staff pada prakteknya, secara langsung diawasi dan disupervisi oleh Pimpinan
	5. Konsultasi (SPM Para. 34) Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa : konsultasi yang tepat telah dilakukan untuk hal-hal yang rumit	5. Konsultasi	Staff KAP Usman & Rekan harus meminta konsultasi kepada pimpinan, jika ada hal yang tidak dimengerti.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, dalam pelaksanaan perikatan, setiap staff baik yang bertugas dilapangan maupun supervisi harus meminta konsultasi kepada pimpinan, mengenai hal-hal

	dan kontroversial, tersedianya sumber daya yang cukup untu kemungkinan terlaksananya konsultasi yang tepat, sifat,lingkup, dan kesimpulan konsultasi didokumentasikan, (Ref. Para.A29-A33; Para. A40)				yang tidak dimengerti, problem yang muncul, dll. Serta setiap pertanyaan konsultaasi harus didokumentasikan atau harus tertulis, serta jawaban konsultasi juga harus tertulis, serta defile di kertas kerja yang bersangkutan (surat internal memo konsultasi).
--	---	--	--	--	---

3.	Perencanaan Audit				
	1.Risiko yang diidentifikasi selama perikatan berlangsung dan tindakan pencegahan yang terkait (Para. A38)	1.Penilaian resiko audit	KAP akan melakukan penilaian resiko yang akan dihadapi	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, melihat, mengamati, dan memperhitungkan resiko yang akan ditanggung oleh auditor.
	2.Pertimbangan yang dilakukan, khususnya yang berhubungan dengan materialitas dan risiko signifikan. (Para. A38)	2.Menetapkan tingkat materialitas	Selain menilai resiko, KAP juga menetapkan tingkat materialitas.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, pertimbangan materalitas, mencakup pertimabangan kuantitatif dan kualitatif.
	3.Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan bahwa penelaahan pengendalian mutu perikatan mencakup pembahasan hal-hal penting dengan rekan	3.Melakukan prosedur analitik	KAP Usman & Rekan melakukan prosedur analitik terhadap klien.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, melihat akun-akun yang signifikan, permasalahan hukum dan pajak yang dimiliki oleh klien.

	perikatan, penelaahan laporan keuangan atau informasi hal pokok lain dari laporan yang akan diterbitkan. (Para. 37)				
--	---	--	--	--	--

	4. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur bagi tim perikatan untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final dari perikatan secara tepat waktu setelah laporan perikatan diselesaikan (Ref. Para A45-A46).	4. Membuat kertas kerja	KAP Usman & Rekan membuat kertas kerja yang disatukan dalam satu file.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, kertas kerja harus disusun sedemikian rupa dan disatukan dalam satu file untuk setiap tahun pemeriksaan yang terdiri dari current file dan permanent file, dan harus disimpan dan diperlihara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
	5. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjelaskan sifat, waktu, dan luasnya suatu penelaahan pengendalian mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur bahwa laporan perikatan tidak diberi tanggal sampai dengan penyelesaian penelaahan pengendalian mutu perikatan. (Ref. Para A35-A36)	5. Menyiapkan audit program	Setelah membuat kertas kerja selanjutnya menyusun dan menyiapkan audit program.	Wawancara dan pengamatan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, program yang secara umum telah disediakan oleh pimpinan. Pelaksanaan audit, harus mengikuti audit program yang telah dirancang untuk setiap klien.

	6. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjelaskan sifat, waktu, dan luasnya suatu penelaahan pengendalian mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur bahwa laporan perikatan tidak diberi tanggal sampai dengan penyelesaian penelaahan pengendalian mutu perikatan. (Ref. Para A35-A36)	6. Menyusun dan menetapkan jadwal audit	Setelah audit program maka KAP akan menyusun dan menetapkan jadwal audit.	Wawancara dan pengambilan dokumen	() Sesuai dengan keterangan, Waktu pelaksanaan audit harus disesuaikan dalam waktu yang telah ditetapkan pimpinan, dan yang telah disesuaikan dengan persetujuan klien.
--	---	---	---	-----------------------------------	--

Sumber data: Hasil Olahan, Tahun 2018

Keterangan :

Tahapan Desain perencanaan audit KAP Usman & Rekan sesuai dengan operasional KAP Usman & Rekan

X Tahapan Desain perencanaan audit KAP Usman & Rekan tidak sesuai dengan operasional KAP Usman & Rekan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu auditor di KAP Usman & Rekan yaitu pak Zul, dan perbandingan menunjukkan adanya kesesuaian antara desain perencanaan audit laporan keuangan Usman & Rekan dengan operasional KAP Usman & Rekan.

Ini berarti bahwa KAP Usman & Rekan dalam melaksanakan pekerjaan profesi Akuntan Publik yang berkenaan dengan perencanaan audit laporan keuangan, KAP Usman & Rekan telah memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh IAPI.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perencanaan audit laporan keuangan, KAP Usman & Rekan mewajibkan setiap anggota KAP untuk wajib mengikuti dan menaati pedoman pengendalian mutu KAP dan memperhatikan unsur pengendalian mutu yang terdapat dalam buku SPM KAP Usman & Rekan.
2. Desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan telah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang ditetapkan oleh IAPI. Dan juga terdapat kesesuaian antara desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan dengan operasional yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan dengan membandingkan dengan perencanaan audit yang diatur dalam SPM (Sistem Pengendalian Mutu) dalam SPAP (SA 300)

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada KAP Usman & Rekan untuk tetap menjaga dan mempertahankan kualitas audit, dengan tidak melupakan standar pekerjaan lapangan yang menyangkut perencanaan audit laporan keuangan. Dan bagi pembaca dan peneliti sejenis yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak hanya meneliti perencanaannya saja, tetapi juga meneliti lebih tajam lagi mengenai tahapan-tahapan perencanaan audit (seperti materialitas, resiko,dll) dan juga kepatuhan yang bukan hanya SPAP, tetapi juga Undang-undang dan kode etik yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Trisnawati.2014.*Praktikum Audit*.Buku 1.Edisi ke-tiga. Penerbit Salemba Empat.Jakarta.
- Agustianto Angga. 2012.*Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Auditor, Gender,dan Kualitas Audit Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
<http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/view/226/221>
- Agustinus Adhi Yudho Pradipto.2010.*Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulistyو dan Rekan*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta.
[http://repository.upnyk.ac.id/8227/1/142080187 -
_ANALISIS_PERENCANAAN_AUDIT_LAPORAN_KEUANGAN_PADA.PDF](http://repository.upnyk.ac.id/8227/1/142080187_-_ANALISIS_PERENCANAAN_AUDIT_LAPORAN_KEUANGAN_PADA.PDF)
- Al-Khaddash Husam,dkk. 2013. *Factors affecting the quality of Auditing: The Case of Jordanian Commercial Banks*.International Journal of Business and Social Science. Vol. 4 No. 11; September 2013.
http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_11_September_2013/20.pdf
- Alwi Fathul Bahri. 2008.*Analisis Pengaruh Perencanaan Audit dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23900/1/Skripsi%0Angga%20Agustianto.pdf>
- Anggraini Iftitah. 2010. *Profesionalisme Auditor Eksternal Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas untuk Tujuan Audit Laporan Keuangan Klien (Studi Empiris pada KAP Di Wilayah Surabaya Pusat dan Timur*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.
http://eprints.upnjatim.ac.id/409/1/file_1.pdf
- Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley.2010.*Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Arikunto Suharsimi.2013.*Manajemen Penelitian*.Cetakan ke-12. Penerbit Rineka Cipta.Jakarta.
- Ashari Ruslan. 2011. *Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara*. Universitas Hassanudin Makassar.
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1372/Skripsi%20Ruslan%20Ashari.pdf>
- Bani Audeh Ahmed, 2014.*The Relationship between Planning of Audit Process and Total Quality Management*. International Journal of Business and Management.ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119. Vol. 9 No.5 April 2014.
<http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v9n5p96>

- Christian Yulius Jogi.2005.*Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan Historis (Studi Kasus pada Beberapa Kantor Akuntan Publik di Surabaya)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.7, No.1, Mei 2005:61-88.
<http://publist.petra.ac.id/~puslit/journals/>
- Lukito Fauji.2015. *Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Dalam Meningkatkan Kualitas Audit*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Volume 6 Nomor 1 Halaman 1-174 Malang, April 2015 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879.
<http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6005>
- Halim Abdul. 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi kelima. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Hasanah Uswatun. 2013.*Pengaruh Perencanaan Audit dan Pelatihan Teknis Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 565-577.
<http://www.e-jurnal.com/2015/08/pengaruh-perencanaan-audit-dan.html>
- Herawaty Arleen dan Susanto Yulius Kurnia. 2009.*Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 11, No. 1, Mei 2009: 13-20.
<http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/17862>
- Indrianto & Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-enam. Penerbit BPFE.Yogyakarta.
- Kerr David S. 2013. *Fraud-risk Factors and Audit Planning: The Effects of Auditor Rank*. Journal of Forensic & Investigative Accounting Vol. 5, Issue 2, July - December, 2013.
http://web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2013-2_3.pdf
- Kuncoro Mudrajad.2009.*Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*.Edisi ketiga.Penerbit Erlangga.Jakarta
- Kusumaningrum Febriana. 2016.*Pengaruh Tekanan Waktu, Tindakan Supervisi, Risiko Audit, Locus Of Control, Dan Komitmen Profesional Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Empiris pada KAP di Jawa Tengah dan DIY)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
<http://eprints.ums.ac.id/41574/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Lestari Anindy Mugia. 2015.*Pengaruh Profesionalisme, Etika, Pengalaman, Pengetahuan Dan Kualitas Audit Terhadap Pertimbangan tingkat Materialitas Akuntan Publik*. Jurnal Akuntansi UNESA Vol 3, No2, 2015.
<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/13211/17059>

- Mailuhu Roland. 2014. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi: Pada Kantor Akuntan Publik dan BPK di Sulawesi Utara)*, Univesitas Sam Ratulangi, Manado.
- Manulang Asna. 2010. *Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Dan Resiko Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit (The Influence of Time Budget Pressure And Risk of Error to Reduced Audit Quality)*. Fokus Ekonomi. Vol. 5 No. 1 Juni 2010 : 81 – 94.
<http://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-fokus-vol-5-no-1-81-94.pdf>
- Mayangsari dan Wandanarum. 2013. *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat*. Cetakan ke-1. Penerbit Media Bangsa. Jakarta.
- Muchlisin Riadi. 2013. *Definisi dan Tujuan Audit*.
<http://www.kajianpustaka.com/2013/03/definisi-dan-tujuan-audit.html#ixzzSCENZBXn>
- Pranesya Fika Arizta. 2013. *Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo Dan Rekan*. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie. Vol 1 No.04, 2013.
http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/316/274
- Standar Profesional Akuntan Publik .2013. Institut Akuntan publik Indonesia. Jakarta.
<http://iapi.or.id/detail/63-Standar-Profesional-Akuntan-Publik>
- Supardi Deddy. 2012. *Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Risiko Audit*. Jurnal Akuntansi. Volume XVI, No. 01, Januari 2012: 35-52.
<http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/viewFile/2172/1916>
- Tjandrawinata Cindy Laurent. 2013. *Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pemahaman Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitass Surabaya. Vol.2 No.1 2013.
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/104>
- Tunggal Widjaja. 2010. *Ikhtisar Teori, Kasus dan Tanya-Jawab Audit Laporan Keuangan*. Penerbit Harvarindo. Jakarta.

FORUM PERTANYAAN

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada pihak KAP Usman & Rekan selama melakukan wawancara:

1. Bagaimana proses terjadinya perencanaan dalam suatu audit yang dilakukan oleh KAP Usman & Rekan?
2. Apakah pihak KAP langsung menerima tawaran dari klien untuk melakukan audit?
3. Apakah KAP Usman & Rekan mampu menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas?
4. Bagaimana ketika perusahaan melakukan pergantian manajemen?.
5. Bagaimana perencanaan audit laporan keuangan KAP Usman & Rekan dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh KAP berdasarkan SPM (Sistem Pengendalian Mutu) dalam SPAP?
6. Jasa apa saja yang disediakan oleh KAP Usman & Rekan?
7. Apakah KAP Usman dan Rekan juga menerima Job dari luar?

